

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan perlu menyadari bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan atau komunitas di sekitar perusahaan (Rahman, 2009). Selain itu, pada masa sekarang ini terjadi perubahan paradigma dari masyarakat dan lingkungan terhadap perusahaan. Salah satu perubahan paradigma tersebut adalah adanya perubahan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Chapple dan Moon, 2005 dalam Saleh, *et al.*, 2010). Perusahaan dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang lebih peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, perusahaan melakukan pertanggungjawaban sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Hackston dan Milne (1996) menyatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan dapat didefinisikan sebagai penyediaan informasi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan dengan keadaan sosial dan lingkungan, sebagaimana dinyatakan dalam laporan tahunan atau laporan sosial yang

terpisah. Pengungkapan tanggung jawab sosial mencakup rincian lingkungan, energi, sumber daya manusia, produk, dan keterlibatan masyarakat. Menurut Daniri (dalam Novita dan Djakman, 2008), perusahaan saat ini tidak lagi ditekankan pada tanggung jawab *single bottom line* yaitu pada nilai perusahaan yang dapat dilihat dari ukuran keuangan saja tetapi juga berpijak pada *triple bottom line* yang terdiri dari nilai keuangan, sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan CSR yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari perusahaan kepada masyarakat (sosial) dan lingkungan melanda dunia bisnis secara global, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan diberlakukannya beberapa peraturan dan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dalam pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Nomor KEP- 04/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Miliki Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang menyatakan adanya peran dari BUMN untuk melaksanakan PKBL, praktik CSR di Indonesia telah diubah dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi suatu

praktik tanggung jawab yang wajib (*mandatory*) dilaksanakan oleh perusahaan.

Sekarang kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin, apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat, dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupnya. Dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan, perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial (Haniffa dan Cooke, 2005). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sayekti dan Wondabio (2007) dalam Machmud dan Djakman (2008) yang menyatakan bahwa dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang.

Keberadaan suatu perusahaan pasti memiliki dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, baik langsung maupun tidak langsung. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat maupun lapangan kerja. Namun di sisi lain, dampak yang diberikan dari keberadaan dan kegiatan produksi suatu perusahaan sering kali merusak lingkungan sekitar dan merugikan masyarakat, misalnya dampak dari limbah produksi.

Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan alam. Beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah pernah mendapatkan kritikan atau kasus antara lain, PT. Freeport Indonesia, TPST Bojong di Bogor, PT. Newmont di Buyat, dan PT. Lapindo Brantas. Sedangkan di Asia kasus salah satu perusahaan produsen perlengkapan dan alat-alat olahraga, Nike, pernah menjadi sorotan utama karena dituduh telah mengabaikan etika bisnis dengan mempekerjakan anak dibawah umur. Salah satu penyebab kondisi seperti ini adalah kurangnya kemaksimalan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

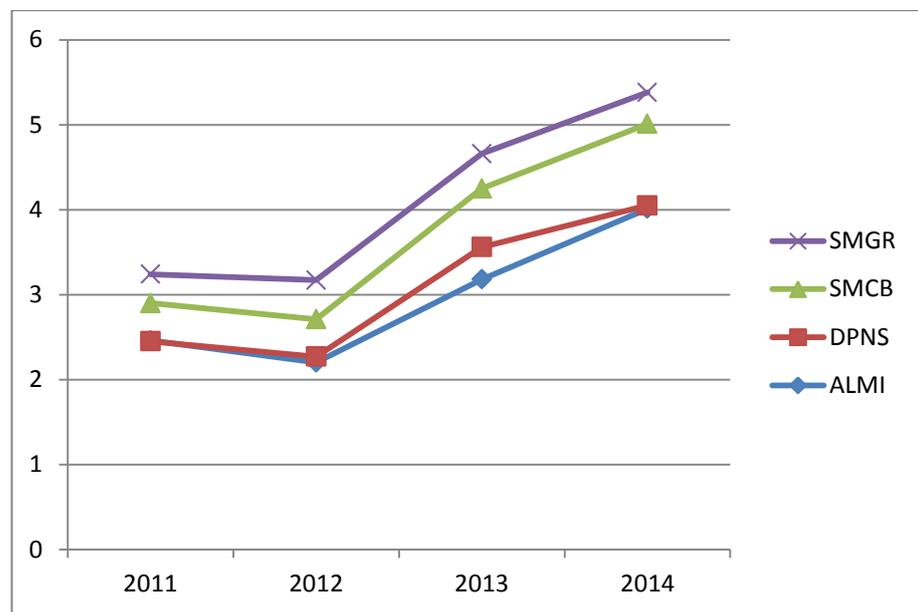
Dengan adanya CSR (*Corporate Social Responsibility*) kinerja perusahaan bisa langsung dinilai oleh pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, media massa khususnya para investor dan kreditor (bank) karena investor maupun kreditor (bank) tidak mau menanggung kerugian yang disebabkan oleh adanya kelalaian perusahaan tersebut terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Untuk melaksanakan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik, sehingga loyalitas konsumen semakin tinggi, seiring meningkatnya loyalitas konsumen, maka penjualan

akan semakin baik, dan pada akhirnya dengan melaksanakan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat.

Selain itu, dalam pasar modal global, terdapat suatu *trend* penerapan indeks perdagangan saham yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah melaksanakan CSR. Sebagai contoh, *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI) yang diperuntukkan bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *Corporate Sustainability* dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Demikian pula dengan *London Stock Exchange* yang memiliki *Socially Responsible Investment* (SRI) *Index* dan *Financial Times Stock Exchange* (FTSE) yang memiliki FTSE Good sejak 2001. Penerapan indeks ini mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di *Hanseng Stock Exchange* dan *Singapore Stock Exchange*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi CSR antara lain *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan tipe industri. Menurut Van Horn (1997) *Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Cahyo (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar kemungkinan perusahaan akan

melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi, maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan CSR. Biaya CSR yang terbatas, maka pengungkapan informasi sosial menjadi rendah atau terbatas.



Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) periode 2011-2014 data diolah

**Gambar 1.1 Debt Equity Ratio**

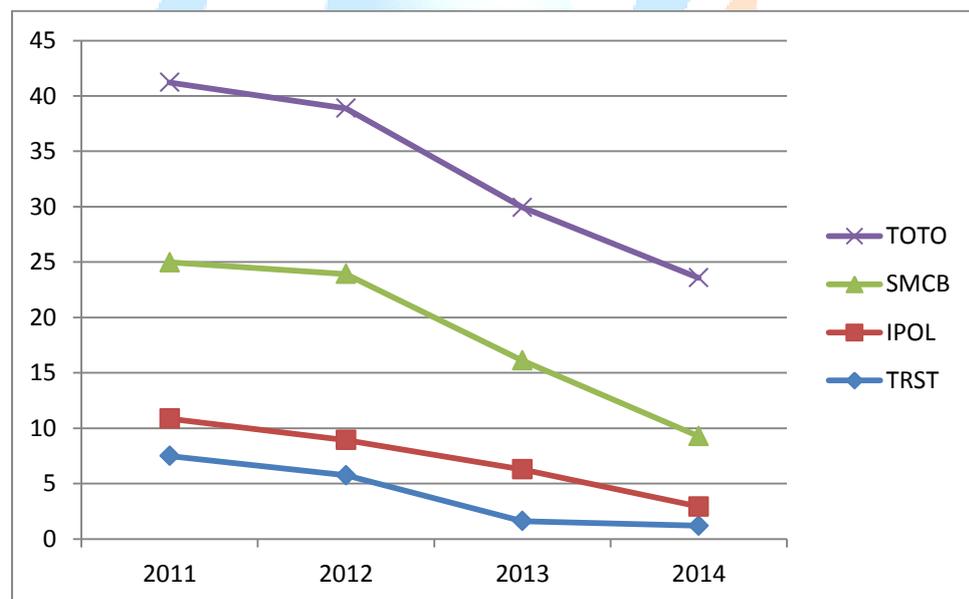
Berdasarkan grafik diatas pertumbuhan *Debt Equity Ratio* (DER) pada empat perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 yaitu PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI), PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS), PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB), dan PT Semen Indonesia persero Tbk (SMGR) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DER berarti modal yang digunakan semakin sedikit dibandingkan

dengan hutang atau kewajibannya. Jensen (1986) dan Zweibel (1996), menyatakan bahwa saat perusahaan mempunyai utang bunga yang tinggi, kemampuan manajemen untuk berinvestasi lebih pada program CSR menjadi terbatas.

Penelitian empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan menunjukkan hasil yang beragam. Rawi dan Munawar (2010) meneliti hubungan kepemilikan manajemen, institusional, *leverage* dan *Corporate Social Responsibility* membuktikan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR. Penelitian Andreas dan Lawer (2010), Susilatri dan Indriani (2011), dan wijaya (2012) ikut membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara *leverage* dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Hasil lain oleh Simanjuntak dan Widiastuti (2004) mereka menemukan hubungan yang positif antara *leverage* dengan kelengkapan pengungkapan CSR. Hasil Penelitian yang sejalan dilakukan oleh Marbun (2008) membuktikan adanya pengaruh antara *leverage* dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, serta Cahya (2010) juga menyatakan bahwa tingkat *leverage* perusahaan yang tinggi akan mendorong perusahaan melakukan pengungkapan sosialnya (kedua variabel berhubungan positif).

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas

dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Heinze, 1976 dalam Anggraini, 2006). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian pengukuran profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan tingkat efektifitas manajemen secara menyeluruh dan secara tidak langsung. Para investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis ini. Selain itu keuntungan (profitabilitas) sangat penting bagi perusahaan bukan saja untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya namun juga memperkuat kondisi keuangan perusahaan.



Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) periode 2011-2014 data diolah

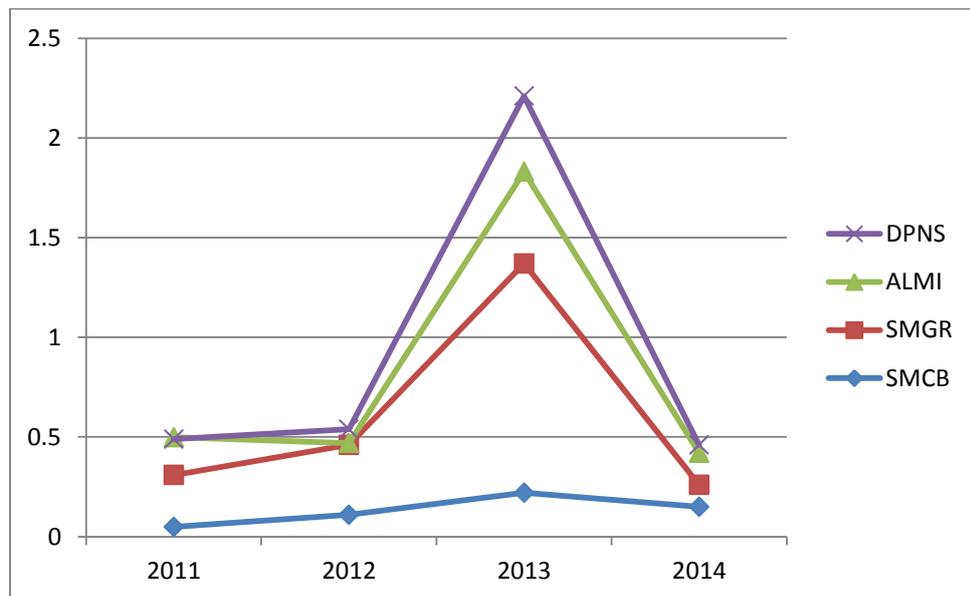
**Gambar 1.2 Net Profit Margin (NPM)**

Berdasarkan grafik diatas bahwa *Net Profit Margin* pada empat perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 yaitu PT Trias Sentosa Tbk (TRST), PT Indopoly Swakarsa Industry

Tbk (IPOL), PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB), dan PT Surya Toto Indonesia (TOTO) dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan terutama pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa NPM dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Perusahaan yang memperoleh laba tinggi, maka terdapat persepsi bahwa pengguna laporan senang untuk membaca berita baik (*good news*) tentang kinerja perusahaan dalam bidang sosial seperti kinerja lingkungan. NPM yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak begitu berhasil karena tidak efisien dan tidak efektifnya produksi, distribusi, keuangan atau manajemen umum, yaitu kondisi umum perusahaan yang tidak menguntungkan atau kelebihan investasi dalam aktiva. Sedangkan pada saat perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka perusahaan merasa tidak perlu untuk mengungkapkan pengungkapan CSR karena perusahaan sudah memperoleh kesuksesan finansial. Penurunan rasio NPM menunjukkan penurunan profitabilitas yang ditandai dengan jumlah laba bersih setelah pajak dikurangi dari penjualan bersih dibandingkan sebelumnya.

Penelitian empiris mengenai profitabilitas telah dilakukan oleh Rahmi *et.al* (2010) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, Sedangkan leverage, size, tipe industri, struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan dalam penelitian Anggraini (2006) tidak berhasil membuktikan pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang umum digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan juga merupakan variabel yang penting dalam praktik CSR dan berperan seperti barometer yang menjelaskan mengapa perusahaan terlibat dalam praktik CSR (Gardiner *et al.*, 2003 dan Seifert *et al.*, 2003 dalam Saleh, *et al.*, 2010). Selain itu, juga dinyatakan bahwa CSR hanya akan tampak berbeda apabila konsep CSR terintegrasi dengan prinsip dan praktik perusahaan dan ketika kemajuan pelaksanaan CSR secara teratur dilakukan monitoring. Perusahaan besar merupakan emiten yang paling banyak disoroti oleh publik sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2006). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan pertumbuhan total aset.



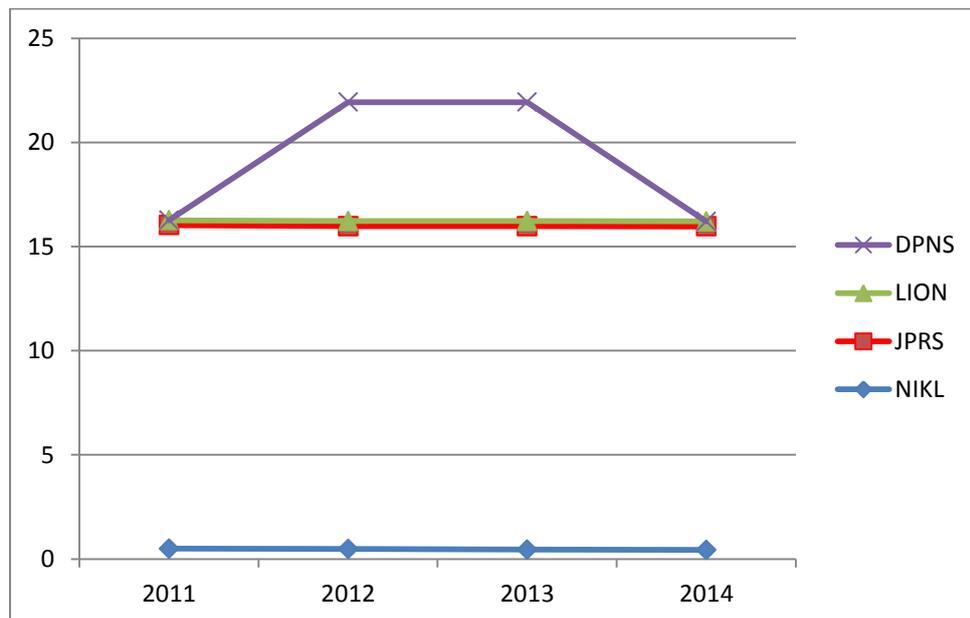
Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) periode 2011-2014 data diolah

### Gambar 1.3 Ukuran Perusahaan

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan total aset dalam ukuran perusahaan pada empat perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 yaitu PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI), PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS), PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB), dan PT Semen Indonesia persero Tbk (SMGR) mengalami penurunan aset pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai total aset maka semakin kecil pula ukuran perusahaanya, serta perusahaan kecil akan mengungkapkan lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini karena ketiadaan sumber daya dan dana yang cukup besar dalam laporan tahunan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil (Waryanti, 2009).

Penelitian mengenai pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, serta profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility* dilakukan oleh Agus Purwanto (2011) berhasil membuktikan bahwa jenis industri dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR. Hasil penelitian lainnya oleh Febrina dan suaryana (2011) tidak menemukan pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dan dewan komisaris dengan pengungkapan CSR.

Tata kelola perusahaan yang dilakukan manajer menjadikan manajer mempunyai hak kepemilikan sebagian dari perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan berarti menjadi pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen akan membantu mengatasi permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka mereka akan semakin termotivasi untuk bekerja lebih giat dan fokus dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini berarti konflik kepentingan akan dapat dikurangi, karena manajemen akan berusaha menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan perusahaan, salah satunya dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR.



Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) periode 2011-2014 data diolah

#### Gambar 1.4 Kepemilikan Manajerial

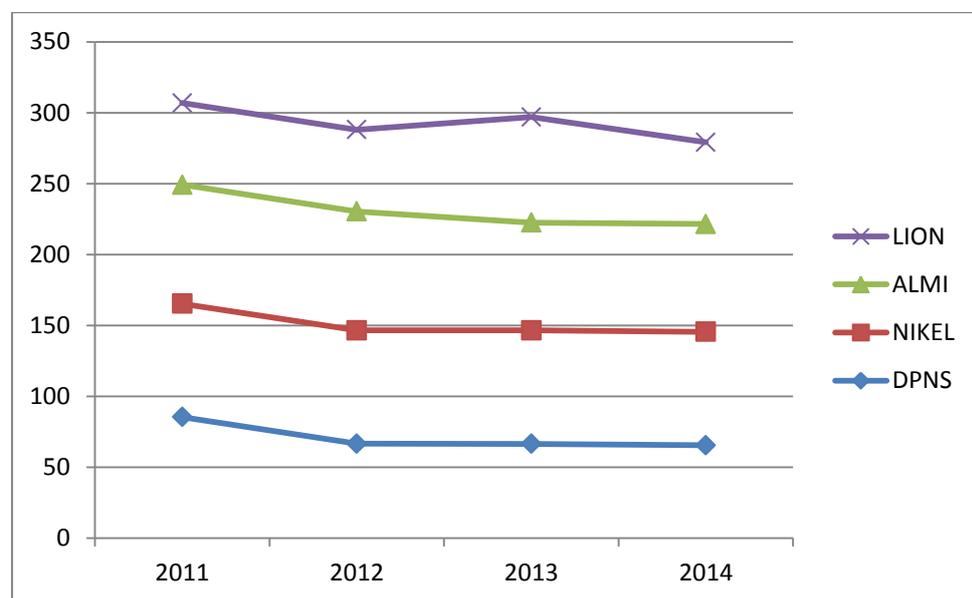
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dalam empat perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 yaitu PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS), PT Lion Metal Works Tbk (LION), PT Jaya Pari Steel Tbk, PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan terdapat tingginya tingkat konflik agensi dalam perusahaan karena sedikitnya jumlah kepemilikan manajerial. Teori keagenen menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil adanya konflik agensi dalam perusahaan adalah dengan memaksimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena menjadi pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling 1976 : 86). Manajer yang memiliki saham perusahaan

tentunya akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan.

Penelitian empiris yang sama sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil ini menunjukkan bahwa presentasi saham yang dimiliki oleh pihak manajer mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang disajikan dalam laporan tahunan (*annual report*). Penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda oleh Ni Wayan (2008) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang

diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Penelitian Murwaningsari (2009) menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan maka tekanan terhadap manajemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialpun semakin besar.



Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) periode 2011-2014 data diolah

### Gambar 1.5 Kepemilikan Institusional

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dalam empat perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 yaitu PT Lion Metal works Tbk (LION), PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI), PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKEL), dan PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat longgarnya pengawasan kinerja manajemen sehingga otomatis manajemen dapat

melakukan tindakan yang dapat merugikan prinsipal. Menurut Jensen dan Meckling (1976) salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi mengawasi agen. Dengan kata lain, akan mendorong pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nurainun dan Krisnawati (2012) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Presentasi saham yang dimiliki oleh pihak institusi tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang disajikan dalam laporan tahunan. Hasil ini tidak mendukung teori pemangku kepentingan (stakeholders) yang menyatakan bahwa stakeholders adalah semua pihak (orang atau lembaga) yang mempengaruhi keberadaan perusahaan dan atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Penelitian ini sejalan menurut Novita dan Chaerul (2008) yang menunjukkan bahwa kepentingan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Menurut Utomo (2000), para peneliti akuntansi sosial tertarik untuk menguji pengungkapan sosial pada berbagai perusahaan yang memiliki perbedaan karakteristik. Salah satu perbedaan karakteristik yang menjadi perhatian adalah tipe industri, yaitu industri *high profile* dan *low profile*. Perusahaan yang termasuk dalam tipe industri *high profile* merupakan perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas tinggi terhadap lingkungan, tingkat risiko politik yang tinggi, atau tingkat

kompetisi yang kuat (Robert, 1992 dalam Utomo, 2000). Selain itu, perusahaan yang termasuk kategori *high profile* umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasi perusahaan memiliki potensi dan kemungkinan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Perusahaan *low profile* adalah perusahaan yang tidak terlalu memperoleh sorotan luas dari masyarakat manakala operasi yang mereka lakukan mengalami kegagalan atau kesalahan pada aspek tertentu dalam proses atau hasil produksinya.

Kriteri-kriteria perusahaan yang termasuk kategori *high profile* :

1. Perusahaan yang tergolong dalam industri *high profile* dalam proses produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah dan polusi. Berdasarkan penelitian Utomo (2000) dalam Mirfazli (2007) menyatakan bahwa praktek pengungkapan sosial kelompok industri *high-profile* lebih tinggi daripada kelompok industri *low profile*.
2. Perusahaan-perusahaan *high profile* umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Robert (1992); Hackston & Milne (1996); Patten (1991) perusahaan yang terklasifikasi dalam kelompok industri *high-profile* antara lain perusahaan perminyakan dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agrobisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman,

media dan komunikasi, energi (listrik), *enggnering*, kesehatan serta transportasi dan pariwisata.

4. Perusahaan yang tergolong dalam industri *high profile* pada umumnya memiliki karakteristik seperti memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah dan polusi (Zuhroh dan Sukmawati, 2003).

Dalam penelitian ini variabel tipe industri diberi skor 0 jika perusahaan termasuk *low profile* dan skor 1 jika perusahaan termasuk *high profile*. Fauzi et al. (2007) menemukan bukti empiris bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Sementara Djakman dan Machmud (2008) menemukan bukti empiris bahwa tipe industri memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berbeda dengan hasil penelitian Diba (2012) yang menyatakan bahwa tipe industri tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Industri dasar dan kimia digolongkan sebagai industri manufaktur karena industri ini menghasilkan produk atau barang jadi dari bahan baku (sumber daya alam) melalui proses mekanis. Sektor industri dasar dan kimia meliputi kayu dan pengolahannya, keramik, porselen, kaca, logam dan sejenisnya, pakan ternak, plastik dan kemasannya, pulp dan kertas, serta semen. Ciri-ciri dari industri ini adalah mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan baku, bahan setengah jadi dan barang jadi. Ciri-ciri lainnya adalah padat energi, penerapan teknologi maju yang telah teruji,

penerapan skala ekonomi minimum, pengamanan pencemaran lingkungan, menggunakan air dalam jumlah besar dan menimbulkan zona-zona industri. Pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang jadi dilakukan melalui 2 kebijaksanaan, yaitu : untuk industri-industri yang mengolah bahan mentah yang dapat diperbaharui seperti industri pulp dan kertas, kebijaksanaan yang diambil dalam pembangunan industri-industri tersebut adalah berskala besar, dalam arti memanfaatkan skala ekonomi, untuk pasaran dalam dan luar negeri dan tetap mempertahankan kelestarian sumber alam seperti melalui reboisasi.

Bagi industri-industri yang mengolah bahan mentah yang tidak dapat diperbaharui seperti industri semen, maka kebijaksanaan pembangunan industrinya didasarkan pada prinsip konservasi dan rasionalisasi penggunaan bahan mentah, mengutamakan guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta meneliti kemungkinan substitusi bahan mentah. Dikarenakan dalam proses produksinya industri kimia terlibat dalam pemrosesan bahan mentah yang diperoleh dari penambangan, pertanian, dan sumber-sumber lain, menjadi material, zat kimia, dan senyawa-senyawa kimia yang dapat berupa produk akhir atau produk antara yang akan digunakan di industri lain, maka limbah yang dihasilkan dari industri ini mengandung zat-zat berbahaya yang berasal dari bahan-bahan pembuatan produk, dan zat-zat kimia tersebut menimbulkan masalah terhadap lingkungan yang begitu besar.

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat banyak kasus kerusakan lingkungan yang terjadi, seperti penggundulan hutan, pencemaran air karena adanya limbah perusahaan, polusi udara, dan bentuk pencemaran lainnya yang mengakibatkan permasalahan sosial dan lingkungan. Beberapa contoh kasus kerusakan industri dasar dan kimia yaitu pada pertambangan batu bara yang berada di Kalimantan Selatan, sekitar 50 warga perwakilan masyarakat Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, mendatangi kantor DPRD setempat guna menuntut ganti rugi tanah pertanian dan perkebunan yang tidak lagi produktif, akibat tercemar limbah batu bara PT Adaro Indonesia. Masyarakat mengungkapkan, sejak ladang dan persawahan mereka dijadikan sebagai saluran pembuangan limbah tanaman yang mereka tanam di atasnya tidak ada yang dapat hidup (Bpost, 11 Februari 2005). Kasus lainnya yaitu kasus lumpur panas pada tahun 2006 yang menenggelamkan tiga kecamatan di Sidoarjo. Puluhan ribu unit rumah dan berbagai infrastruktur terendam lumpur. Belum lagi ancaman kesehatan dari berbagai materi yang terkandung di lumpur, diantaranya gas Hidrogen Sulfida, fenol, Kadmium (Cd), Timbal (Pb), dan besi (Fe) yang melebihi ambang baku mutu (Hutagaol, 2013). Contoh tersebut hanya merupakan sebagian kecil gambaran fenomena kegagalan CSR yang muncul di Indonesia, dan masih banyak lagi contoh kasus lainnya.

Penelitian ini mengambil perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan industri dasar dan

kimia memiliki kontribusi yang cukup besar dalam masalah-masalah seperti polusi, limbah, dan keamanan produk serta tenaga kerja. Dari beberapa kasus yang sudah dipaparkan, pemerintah mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bab V pasal 74 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini disebabkan karena perusahaan industri dasar dan kimia merupakan yang paling banyak berinteraksi dengan sumber daya alam yang akan menghasilkan limbah produksi dan masalah pencemaran lingkungan. Sepanjang tahun 2013 terpantau enam sektor merah, salah satunya sektor pemberat indeks adalah sektor industri dasar dan kimia yang dibebani kinerja buruk perusahaan semen, dimana mencatat penurunan sebesar 9,54%. Buruknya kinerja IHSG sepanjang 2013 lebih banyak disumbang oleh emiten di sektor industri yang menggunakan materi impor serta harga jual produknya dipengaruhi faktor global (Vibiznews, 1 Juli 2014).

Motivasi dalam penelitian ini adalah ketidak konsistenan dari penelitian sebelumnya. Dari fenomena-fenomena yang terjadi dan dari hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR masih menunjukkan hasil yang berbeda. Hal inilah yang akan menjadi *research gap* dalam penelitian ini, sehingga menarik dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan

*research gap* tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut inilah yang memotivasi peneliti untuk meneliti dan menguji faktor-faktor apa saja yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Maka judul yang diangkat menjadi penelitian ini adalah **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Serta Profitabilitas Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Studi Empiris : Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang penelitian yang diuraikan diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan industri dasar dan kimia belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Rendahnya serta ketidakkonsistenan pengungkapan CSR dalam perusahaan menyebabkan banyak kasus-kasus kerusakan lingkungan seperti limbah perusahaan, polusi udara, dan bentuk pencemaran lainnya yang mengakibatkan permasalahan sosial dan lingkungan.
3. Pertumbuhan *Debt Equity Ratio* (DER) mengalami peningkatan membuat kemampuan manajemen melaporkan CSR menjadi rendah.

4. Pertumbuhan *Return On Asset* (ROA) yang setiap tahunnya mengalami perubahan menjadikan perusahaan merasa tidak perlu melaporkan CSR.
5. Pertumbuhan total aset yang menurun menyebabkan pengungkapan sosial perusahaan menjadi rendah.
6. Kepemilikan manajerial yang mengalami penurunan dapat meningkatkan *agency conflict* antara manajer dan pemegang saham.
7. Kepemilikan institusional mengalami penurunan menyebabkan longgarnya pengawasan kinerja terhadap manajemen.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi yang telah diuraikan diatas, terjadi beberapa masalah yang muncul dari penerapan CSR, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Variabel dari judul yang diangkat menjadi penelitian ini yaitu Kepemilikan Manajemen yang diukur dengan jumlah saham manajemen dibagi jumlah saham yang beredar, Kepemilikan Institusional diukur dengan jumlah saham institusional dibagi jumlah saham yang beredar, *Leverage* menggunakan *Debt Equity Ratio*, Tipe Industri diprosikan dengan *dummy variable* yaitu diberi skor 1 apabila perusahaan termasuk dalam industri *high profile* dan skor 0 apabila perusahaan termasuk dalam industri *low profile*, Ukuran Perusahaan menggunakan *log of total assets*, Profitabilitas dengan

*Return On Asset (ROA)* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* diukur dengan index CSR.

2. Peneliti hanya memfokuskan objek penelitian pada industri manufaktur sub sektor dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode tahun penelitian pada industri manufaktur sub sektor dasar dan kimia tahun 2010-2014.

### **1.3 Perumusan Masalah**

1. Apakah Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, serta Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia periode 2010-2014?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara Kepemilikan Manajemen terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia periode 2010-2014?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia periode 2010-2014?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia periode 2010-2014?

5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Tipe Industri terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia periode 2010-2014?
6. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia periode 2010-2014?
7. Apakah terdapat pengaruh secara parsial profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2010-2014?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, serta Profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2010-2014.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2010-2014.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2010-2014.

4. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2010-2014.
5. Untuk menganalisis pengaruh Tipe Industri terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2010-2014.
6. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2010-2014.
7. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2010-2014.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Perusahaan**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam mengelola perusahaan, guna pengambilan kebijakan manajemen perusahaan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan.

#### **2. Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai pertanggungjawaban sosial perusahaan serta referensi bagi investor dalam berinvestasi.

### 3. Masyarakat

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai peranan dan praktik *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

### 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut.

